



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 928/II/X/2016

**Penanganan Dimas Kanjeng
Sesuai Mekanisme Hukum**

**Ketua DPR RI Tandatangani
Naskah Ikrar
Hari Kesaktian Pancasila**

**Penanaman Moral Pancasila
Harus Dimulai Sejak Dini**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Suasana pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim di Masjid Padepokan, Probolinggo

Penanganan Dimas Kanjeng Sesuai Mekanisme Hukum

Komisi III DPR RI menghormati dan menghargai masyarakat Indonesia yang berada di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Karena para pengikut Dimas Kanjeng yang datang ke Padepokan bermacam-macam agama. Seperti Islam, Budha, Hindu, Khonghucu, Kristen bahkan Katholik ada disini.

“Tempat ini diciptakan sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang kondusif bagi para santri untuk lebih mendekati diri dengan Yang Maha Penciptanya. Itu sisi positifnya,” ungkap Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman kepada Parle usai pertemuan Tim kunjungan spesifik Komisi III DPR RI dengan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim, di Masjid Padepokan, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (1/10).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, ada cerita bahwa Dimas Kanjeng memiliki kemampuan-kemampuan metafisika atau kemampuan spiritual, yakni kemampuan untuk menggandakan uang. Walaupun belum diketahui, apakah uang yang diadakan oleh Dimas Kanjeng ini asli atau palsu.

"Yang jelas dari segi otoritas yang menerbitkan uang

tentu ini tidak boleh. Karena Undang-undang Mata Uang menegaskan yang punya wewenang untuk mengeluarkan uang hanya Bank Indonesia (BI). Lembaga yang lain juga tidak boleh, apalagi di luar itu jelas tidak boleh. Karena itu, apabila ini benar maka tentu menjadi masalah hukum dan itu urusan penegak hukum," tegas Benny.

Menurutnya, masalah yang berkenaan dengan problem hukum disini tentu sepenuhnya menjadi urusan penegak hukum untuk dilaksanakan dan diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

"Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku tanpa menghilangkan hak para santri untuk tetap melakukan meditasi dan mendekati diri dengan Yang Maha Kuasa disini," ungkapnya. ■

Peran Politik Islam Makin Signifikan Dalam Politik Nasional

Ketua DPR RI Ade Komarudin menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional ke dua Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), yang mengangkat tema "Merajut Persatuan Umat, Membangun Bangsa", di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (02/10).

Dalam sambutannya Ade Komarudin menyampaikan paparan tentang pemikiran dan peran politik Islam dalam mewujudkan persatuan umat. Ia juga mengatakan apakah politik Islam dapat menjadi benteng persatuan umat di Indonesia, sementara tokoh-tokoh Islam menyebar ke berbagai partai politik.

"Peranan politik Islam semakin signifikan didalam politik nasional, konsep umat memang sepanjang sejarahnya telah banyak mengilhami imajinasi kaum muslim, khususnya kaum intelektual Islam sejak periode awal. Terminologi umat muncul lebih dari 60 kali dalam Al Qur'an dan memiliki beragam makna, namun dari sejumlah makna tersebut, istilah umat sejak fase-fase awal Islam telah digunakan untuk melambungkan dan mewujudkan gagasan tentang komunitas Islam," paparnya.

Ade Komarudin menjelaskan bahwa dalam Islam, agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Menurut Islam, Kitab Suci Al Qur'an memperlakukan kehidupan manusia sebagai suatu keseluruhan organik, artinya semua bidang kehidupan manusia harus dibimbing oleh petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Al Qur'an, termasuk didalamnya kehidupan politik.

"Sejak awal umat Islam pada dasarnya adalah umat yang memiliki kesadaran politik. Oleh karena itu perkembangan



Ketua DPR RI Ade Komarudin menjadi pembicara pada acara Mukernas Parmusi

politik di Indonesia tidak bisa melepaskan dari perjuangan politik Islam, terlebih lagi mayoritas atau sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam," tutur pria yang akrab disapa Akom itu.

Meskipun demikian, lanjutnya, ekspresi politik bangsa Indonesia dalam kenyataannya tidak bersifat monolitik, yakni umat Islam di Indonesia menyebar dan terbagi di berbagai partai. Sejak periode awal kemerdekaan ekspresi politik umat Islam telah berpolarisasi ke dalam dua golongan, yakni golongan Islam dan golongan Kebangsaan.

Namun polarisasi itu tidak harus dipahami secara mutual eksklusif, dengan implikasi turunannya yang satu disebut pro Pancasila, dan yang lain kontra

Pancasila. Dalam kenyataannya baik anggota golongan Kebangsaan maupun golongan Islam ternyata tidak juga monopolitik, pada masing-masing golongan itu selalu ada orang-orang yang berdiri pada posisi sebagai jembatan penghubung.

"Saya setuju bila Parmusi tidak usah berniat menjadi partai politik, sebaiknya berdakwah saja, dan melakukan aksi keumatan dalam berbagai sektor dengan baik. Politik Islam tidak seharusnya dimaknai secara sempit sebagai agenda untuk merebut kekuasaan formal, mengabdikan kepada umat dibarengi dengan perdebatan intelektual yang berkualitas harus terjadi dalam Parmusi," pungkasnya. ■

(dpr/mp) Foto: Ryzan/hr



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djujiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Muriyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon Ifan, Siti Rondiyah, Oji **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) | ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN |

Ketua DPR RI Tandatangani Naskah Ikrar Hari Kesaktian Pancasila

Ketua DPR RI Ade Komarudin membaca dan menandatangani naskah Ikrar pada saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Komplek Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Sabtu (1/10).

Upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo yang bertindak selaku Inspektur Upacara, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan tinggi lembaga Negara, serta Atase Militer dari negara-negara sahabat.

"Peringatan ini penting untuk dilakukan, mengingat Pancasila pernah terganggu dan terancam. Terlebih lagi setelah reformasi bangsa ini sedikit melupakan Pancasila sebagai Ideologi, padahal Pancasila nyaris tumbang karena



Suasana Upacara Kenegaraan memperingati Hari Kesaktian Pancasila

ideologi yang lain," ucap Ade Komarudin usai mengikuti upacara.

ideologi yang tangguh atas ideologi yang lain," pungkasnya.■

ideologi yang tangguh atas ideologi yang lain," pungkasnya.■

Ade Komarudin juga mengatakan, rakyat Indonesia harus tetap mengingat Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dan pandangan hidupnya.

"Sejarah hitam tidak boleh terulang, oleh karena itu masyarakat Indonesia harus terus membaca dan mengenang sejarah dengan baik, agar kita tidak mengulangnya. Bulan Oktober pada masa lalu itu adalah hari-hari yang cukup menyakitkan bagi bangsa Indonesia, tetapi kita harus tetap menunjukkan bahwa ideologi Pancasila sebagai

(dep) foto: ryan/br

Turnamen Tenis Piala Ketua DPR RI Ajang Jalin Silaturahmi Dengan Mitra Kerja

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyerahkan hadiah kepada para pemenang turnamen tenis lapangan, yang digelar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan dan Ulang tahun DPR RI yang ke 71. Pertandingan yang digelar dilapangan tenis DPR RI itu, memperebutkan piala bergilir Ketua DPR RI dan hadiah sejumlah uang tunai dengan total nilai sebesar 50 juta Rupiah.

"Pertandingan ini akan terus dilakukan pada setiap tahun, terutama dalam rangka memperingati Dirgahayu Kemerdekaan dan Ulang Tahun DPR RI. Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi dengan

institusi lain yang merupakan mitra kerja DPR RI," ujar Ade Komarudin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/10).

Ita juga menjelaskan bahwa ada beberapa cabang olah raga yang digeluti

oleh keluarga besar Dewan, seperti tenis lapangan, badminton, sepak bola, senam, tenis meja, dan lain sebagainya.

"Cabang tenis ini sudah lama dilakukan oleh Pimpinan Dewan sebelum saya, kejuaraan tenis ini hanya



Suasana pembagian hadiah turnamen tenis piala Ketua DPR RI

melanjutkan yang pernah dilaksanakan pada masa yang lalu. Bagi teman-teman di DPR RI, olah raga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Karena rata-rata kegiatannya adalah rapat yang lebih banyak posisi duduk dari pagi hingga malam, kemudian kunjungan kerja ke berbagai daerah, maka dituntut untuk selalu sehat," ucapnya.

Menurutnya, animo masyarakat cukup bagus terhadap acara tersebut, dan silaturahmi yang tercipta melalui olah raga itu sangat baik dibandingkan dengan cara yang lain.

"Saya juga masih aktif bermain tenis, namun karena kondisi kesehatan kaki saya sedang kurang baik dan masih dalam pengobatan, maka untuk sementara saya tidak diizinkan untuk bermain tenis dahulu," jelas pria yang akrab disapa Akom itu.

Sementara itu, hasil Pertandingan final antara tim petenis dari Mahkamah Agung melawan tim petenis dari PLN, dimenangkan oleh tim petenis Mahkamah Agung. Tim PLN menempati urutan kedua, dan sebagai juara ketiga diraih oleh tim dari

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan UMS dibawah pimpinan Anggota Komisi IV DPR RI Nasyid Umar.

Para pemenang mendapatkan piala sesuai dengan peringkatnya, dan khusus untuk juara pertama berhak menerima piala bergilir Ketua DPR RI. Selain itu, masing-masing pemenang juga memperoleh hadiah uang tunai, yakni bagi juara ketiga masing-masing menerima hadiah sebesar 7,5 juta rupiah, juara kedua sejumlah 15 juta rupiah, dan juara pertama mendapat uang senilai 20 Juta rupiah. ■

(dep) fotocopy/hr

AIPA Dituntut Mampu Imbangi Dinamika Kawasan

Dinamika yang terjadi di kawasan negara-negara ASEAN perlu diimbangi perkembangannya oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). AIPA yang aktif dan efektif sangat dibutuhkan untuk menyambut visi ASEAN 2025.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat mengikuti Sidang Umum ke-37 AIPA di Nay Piy Taw, Myanmar, pada 29 September-3 Oktober 2016. Sidang AIPA kali ini mengusung tema "*Vibrant AIPA for a Progressive ASEAN Community*", sebuah tema yang relevan dengan dinamika kekinian ASEAN.

Menurut Fahri, saat ini pendekatan *business-as-usual* tidak lagi cukup untuk

membangun komunitas yang terpadu secara politis dan ekonomi, serta harmonis secara budaya dan mengutamakan tanggung jawab sosial di tengah ketidakpastian global. "AIPA sebagai mitra legislatif utama ASEAN dituntut mampu mengimbangi dinamika kawasan. AIPA yang aktif dan efektif sangat dibutuhkan dalam mendukung pencapaian visi ASEAN 2025."

Fahri yang memimpin delegasi DPR RI ini, menekankan pada stabilitas kawasan sebagai syarat mutlak keberhasilan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kerja sama keamanan maritim juga menjadi urgen di antara



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam acara AIPA di Myanmar

negara-negara ASEAN. Ada banyak tantangan yang dihadapi ASEAN. Misalnya, tantangan konvensional seperti konflik wilayah dan tantangan non-tradisional seperti perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang. "Namun, AIPA tetap harus mengutamakan pendekatan persahabatan dan kerja sama yang merupakan semangat dasar ASEAN," katanya.

Pada bagian lain, politisi PKS ini mengungkapkan, prinsip-prinsip demokrasi juga perlu ditegakkan di negara-negara ASEAN, agar pemenuhan HAM, kebebasan fundamental, dan kemakmuran

masyarakat ASEAN terpenuhi. "Namun, dalam hal ini saya mengajak negara-negara AIPA untuk terus memajukan demokrasi dan tidak hanya berhenti pada elektoral demokrasi saja. Demokrasi substansial sebaiknya menjadi agenda bersama kita di kawasan," tandas Fahri.

Sidang Umum AIPA dibuka oleh Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor Myanmar, yang sekaligus menjadi *keynote speaker*. Dalam pidato kuncinya, Suu Kyi menekankan

kembali mengenai penguatan kerja sama dan persahabatan di kawasan dengan peningkatan peran AIPA dan parlemen masing-masing negara ASEAN. Untuk menjadi kawasan yang kondusif bagi pembangunan, ASEAN harus selalu menghindari friksi, mengedepankan cinta kasih, dan menjamin rasa aman bagi masyarakatnya.

Delegasi BKSAP DPR RI yang turut serta dalam rombongan adalah Nazarudin Kiemas (F-PDI Perjuangan), Andika Pandu Puragabaya (F-Gerindra), Indira Chunda Thita Syahrul (F-PAN), dan Nurhayati Manoarfa (F-PPP). ■

(mh, BKSAP) foto: dok.bksap/hr

Parlemen Berperan Penting Dalam Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan parlemen punya peran penting dalam upaya memberantas korupsi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, parlemen bisa membuat undang-undang antikorupsi, menyusun anggaran negara dan melakukan pengawasan program pemerintah agar terhindar dari praktik-praktik korupsi.

Hal ini disampaikan Fadli saat berbicara dalam acara *The Middle East and North Africa-The Organization for Economic Co-operation and Development (MENA-OECD) Governance Forum* di Tunis, Tunisia, Senin (3/10). Fadli datang ke acara tersebut sebagai Ketua *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)* yang diundang secara khusus oleh MENA-OECD, didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Rofi Munawar.

Para pembicara lain dalam acara ini diantaranya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Pemerintahan Tunisia Abid Briki; Menteri PAN Prancis Annick Girardin; Menteri Keuangan Tunisia Lamia Zribi; Menteri Perempuan, Keluarga, dan Anak Tunisia Nezha Labidi; Penasehat Kabinet Irlandia Mary Hanafin; Sekjen Kementerian Pemuda Yordania Satam Awad; dan Direktur Regional untuk Wilayah Asia Tengah Kantor Luar Negeri Jerman Philipp Ackermann. Beberapa organisasi pemuda dunia juga ikut menyampaikan pendapatnya.

Di awal paparannya, Fadli mengemukakan mengenai tujuan OECD yang ingin mewujudkan pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang bisa dinikmati semua pihak. Namun, pembangunan semacam ini tidak akan tercapai jika masih terjadi banyak korupsi.

Karena itu, kata politisi Gerindra ini, sebagai wakil rakyat, parlemen harus ikut berperan dalam memberantas korupsi. "Setidaknya ada hal yang bisa dilakukan parlemen untuk memerangi korupsi, yaitu melalui fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan," jelasnya.

Untuk dapat melakukan peranan ini dengan baik, kata Fadli, setiap anggota parlemen harus melakukan dua hal.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Pertama, meningkatkan kapasitas pribadi. Setiap anggota parlemen harus memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang anti-korupsi. Kedua, memperkuat jaringan antar-parlemen dunia. "Memerangi korupsi dapat lebih efektif jika anggota parlemen bergabung bersama sebagai sebuah kelompok, bukan perorangan. GOPAC adalah contoh jaringan parlemen internasional yang fokus pemberantasan korupsi," jelasnya.

Fokus utama GOPAC, kata Fadli, adalah pengembangan perangkat praktis dan pelatihan bagi anggota parlemen dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, GOPAC juga aktif mempromosikan metode untuk memerangi korupsi. Sejak terbentuk di 2002, GOPAC telah aktif melakukan hal ini. "Salah satu program yang baru-baru ini dilakukan GOPAC adalah memperkuat peran parlemen dalam mengawal pelaksanaan sasaran pembangunan

berkelanjutan (SDGs)," ucapnya.

Saat ini, lanjut Fadli, GOPAC sedang mengembangkan handbook untuk anggota parlemen yang dapat digunakan sebagai panduan untuk memantau dana pembangunan, serta pengawasan proses pelaksanaan SDGs. "Kami juga berusaha untuk meningkatkan pembangunan kapasitas para anggota parlemen dengan melakukan lokakarya SDGs," jelasnya.

Lokakarya pertama dilakukan di Jakarta pada 30-31 Agustus lalu. Peserta yang hadir antara lain anggota DPR RI dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maroko. Unsur dari pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi juga ikut hadir.

Di acara *The Middle East and North Africa-The Organization for Economic Co-operation and Development (MENA-OECD) Governance Forum* di Tunis, para peserta diberi kesempatan untuk memaparkan pandangannya, berbagi pengalaman dan berdiskusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang ditargetkan dalam SDGs. ■

(andri.mp), foto: andri/br.

Paripurna DPR RI Setujui Bahrullah Akbar Menjadi Anggota BPK RI

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Bahrullah Akbar menjadi Anggota BPK RI. Rapat pada Selasa (4/10) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Ruang Rapat Paripurna Nusantara II, DPR RI, Jakarta.

“Tiba saatnya kita untuk mengambil keputusan, apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat disetujui?” tanya Taufik, serentak dijawab Para Anggota DPR RI "Setuju...", lalu Pimpinan Sidang mengetuk palu sebagai tanda

DPR RI Topang Kesultanan Cirebon Tetap Dilestarikan

Tepat pada saat masuknya bulan Muharam 1438 Hijriah, Kesultanan Kesepuhan Cirebon menggelar Kirab Agung Macan Ali Nuswantara. Kirab agung ini adalah bagian dari perayaan ulang tahun Kesultanan Cirebon, yang senantiasa dilaksanakan pada tanggal 1 Muharam tahun hijriah. Ketua DPR RI Ade Komarudin berkesempatan untuk memberikan sambutan sebagai tanda pembuka jalannya acara tersebut.

“ DPR RI melalui Komisi X dibantu oleh Badan Anggaran DPR RI, dari tahun ke tahun terus menopang agar Kesultanan Cirebon dapat tetap dilestarikan dengan baik. Pemerintah dan seluruh warga berkewajiban untuk melestarikan *legacy* dari para leluhur kita ini,” ucap Ade Komarudin dalam sambutannya, di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (2/10).

Ia juga mengatakan, DPR RI akan terus berusaha membantu dan mengupayakan melestarikan warisan leluhur dapat berjalan dengan baik.

"Kita harus menjunjung tinggi tradisi, terutama tradisi ke Islam para leluhur kita. Peringatan ulang tahun dan Kirab agung ini adalah salah satu cara kita berterima kasih kepada leluhur yang telah meninggalkan *legacy* yang luar biasa," ucapnya.



Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima pusaka cangak pada saat acara kirab agung kesultanan Cirebon

Menurutnya, tradisi-tradisi seperti ini harus terus dilestarikan dan di syi'arkan, mudah-mudahan *legacy* dari Maulana Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) dapat terus dilestarikan sepanjang jaman.

"Laskar Macan Ali Nuswantara

merupakan simbolisasi jayanya titisan Prabu Siliwangi di tanah Jawa, yang sempat menguasai Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten. Laskar ini sebagai pengingat kita akan kesatriaian suku sunda. Keikhlasannya berjuang bersama pasukan lainnya, menentang penjajahan kolonial Belanda yang ingin menjajah tanah sunda. Laskar ini juga sebagai bukti sejarah bahwa asal mulanya tentara adalah rakyat, dan rakyat adalah tentara. Manunggal bersama untuk mempertahankan negara Republik Indonesia," paparnya.

Ia berharap agar semua pihak dapat berkomitmen untuk menjaga *legacy* dan warisan para leluhur Kesultanan Cirebon tersebut. Pada kesempatan itu juga, Ade Komarudin didaulat untuk menyerahkan secara simbolis, pusaka cangak kepada 50 pimpinan kontingen Laskar macan Ali. ■

(dep.mpr) Foto : Ryan/mr.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menyerahkan laporan hasil pembahasan Calon Anggota BPK

persetujuan.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menyampaikan laporan Komisi XI DPR RI tentang hasil pembahasan Calon Anggota BPK RI. Setelah melalui proses pemungutan dan perhitungan suara terhadap 22 calon yang

telah mengikuti uji kelayakan diperoleh hasil dengan urutan terbanyak sebagai berikut.

Bahrullah Akbar memperoleh 30 suara, Abdul Latief memperoleh 17 suara, dan Anggito Abimanyu memperoleh 9 suara.

Ketentuan tentang pemilihan calon Anggota BPK RI diatur sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan dinyatakan, bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Adapun rangkaian proses yang telah dijalankan oleh Komisi XI DPR RI diawali dengan membuka pendaftaran Calon Anggota BPK 20 Juni 2016. Sampai batas

waktu pendaftaran pada 1 Juli 2016, telah mendaftar sebanyak 25 calon.

Pada 25 Juli 2016, Rapat Internal Komisi XI DPR RI telah memutuskan 24 calon yang memenuhi persyaratan administrasi akan disampaikan kepada DPD untuk dimintai pertimbangan.

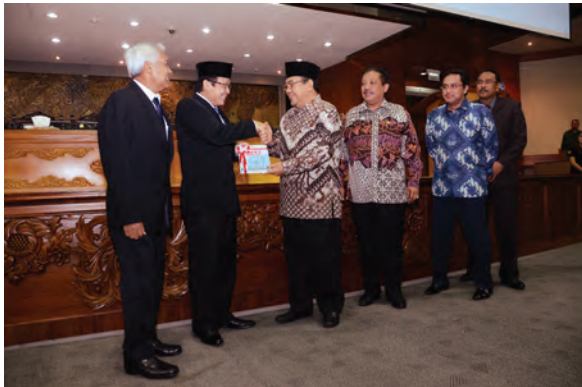
Pada 19-21 September 2016, Komisi XI DPR RI telah melakukan proses uji kelayakan terhadap 22 calon, sedangkan dua calon tidak menghadiri proses uji kelayakan. Proses pembahasan satu Calon Anggota BPK di Komisi XI DPR RI diakhiri dengan proses pengambilan keputusan dalam Rapat Internal Komisi XI pada 21 September 2016.

Dalam Rapat Internal disepakati bahwa mekanisme pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup. ■

(eko), foto: jay/br.

DPR RI Akan Tindaklanjuti Ikhtisar Pemeriksaan BPK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, hasil rekomendasi BPK itu wajib ditindaklanjuti.



Pimpinan DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I beserta LHP Semester I tahun 2016 dari BPK

“Hasil rekomendasi BPK RI wajib ditindaklanjuti. Bila tidak ada tindak lanjut, akan ada sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Taufik usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (4/10). Saat memimpin rapat, Taufik didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto.

Kewajiban untuk menindaklanjuti ini, tambah Taufik, merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Taufik menjelaskan, proses penghematan dan sejumlah kebijakan ekonomi di masa transisi, sedikit banyak mempengaruhi penyerapan anggaran di kementerian maupun lembaga. Apalagi, masa transisi bukan hanya politik, melainkan juga pengendalian dan prospek ekonomi makro.

“Kondisi ekonomi global saat ini memang sedang tidak bersahabat. Tak heran bila dalam proses anggaran yang sudah berjalan, tiba-tiba ada pemotongan. Pemotongan anggaran itu menjadi pertimbangan dan pengkajian ulang terhadap kepastian alokasi anggaran,” jelas Taufik.

Politisi F-PAN itu mencontohkan, pengkajian ulang itu dilakukan pada program yang diperoleh melalui lelang, jelas tidak

mungkin bila memaksakan anggaran seperti yang sudah dialokasikan sebelumnya. Sehingga, perlu dikaji ulang agar program tersebut tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Sementara itu, penurunan 6 poin opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, dari 71 persen menjadi 65 persen dibandingkan tahun 2014,

dinilai Taufik sebagai sesuatu hal yang wajar. “Sangatlah wajar bila ada penurunan hingga mencapai 6 poin. Hal ini jelas terkait dengan situasi eksternal dan bukan karena memburuknya kinerja. Bahkan bisa jadi faktor eksternal tersebut merupakan pengamanan dari alokasi anggaran itu sendiri,” ujarnya.

Namun, Taufik mendesak agar penghargaan dan sanksi diberikan kepada kementerian/ lembaga, sesuai dengan opini yang diberikan oleh BPK. **S e h i n g g a**, kementerian/ lembaga yang selama ini memperoleh opini WTP, harus diapresiasi lebih **d i b a n d i n g** kementerian/ lembaga lain yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak M e m b e r i k a n

Pendapat (TMP).

“Hal ini harus dipertimbangkan sebagai acuan. Demikian pula dengan penyerapan anggaran, yang tidak semata-mata berdasarkan penyerapan sebelumnya. Melainkan bagaimana anggaran bisa mempengaruhi kinerja dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tukas wakil rakyat asal Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dalam laporannya mengatakan, dalam pemeriksaan LKPP, BPK memeriksa 85 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL). Termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

“Dengan hasil 55 LKKL (65 persen) memperoleh opini WTP,” ungkapnya. Sedangkan 26 LKKL (30 persen) memperoleh opini WDP dan 4 LKKL (5 persen) memperoleh opini TMP;” jelasnya.

BPK juga memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2015. LKPP tersebut merupakan pertanggungjawaban atas APBN Tahun 2015. Pengecualian opini atas LKPP Tahun 2015 meliputi penyertaan modal Negara pada PT PLN (Persero) sebesar Rp 848,38 triliun, mengandung ketidakpastian. Selain itu, Laporan Keuangan SKK Migas malah memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dari BPK. ■

(bnp), foto: jktabkr

Komisi VI DPR RI Minta Pemerintah Dukung Anggaran Koperasi dan Industri Kecil

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan sektor koperasi, industri menengah dan kecil sebagai penggerak perekonomian Indonesia.

“Komisi VI mendorong kepada Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada mitra kerja yang membidangi BUMN, UMKM, Koperasi, Industri dan Perdagangan, sebagai penggerak perekonomian Indonesia,” kata Hekal, saat memimpin Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI meninjau Koperasi Borneo Agrosindo, di Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi

Sidang Umum AIPA ke-37 Hasilkan Beberapa Resolusi

Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-37 yang digelar di Nay Pyi Taw, Myanmar menghasilkan beberapa resolusi untuk kepentingan kawasan regional ASEAN. Delegasi DPR RI yang turut serta dalam pertemuan itu, mengusulkan satu rancangan resolusi di tiga komisi.

Demikian terungkap dalam pertemuan AIPA bertajuk *Vibrant AIPA for a Progressive ASEAN Community* pada 30 September hingga 3 Oktober 2016. Resolusi-resolusi tersebut merupakan hasil keputusan sidang-sidang Komisi Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA), Politik, Ekonomi, Sosial, dan Organisasi. Tahun ini, Indonesia mengusulkan masing-masing satu rancangan resolusi di tiga Komisi.

Komisi Politik, misalnya, menyetujui lima resolusi termasuk rancangan resolusi usulan Indonesia, "*Enhancing Maritime Security Cooperation and Protection of Marine Resources in ASEAN*", yang menitikberatkan pada dialog penyelesaian isu-isu maritim. Resolusi ini, sebagai bentuk kepedulian bersama sekaligus memperkuat *ASEAN-led mechanism* untuk keamanan maritim



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

dan perlindungan sumber daya kelautan.

Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyertakan para anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) yang terdiri dari Nazarudin Kiemas (F-PDI Perjuangan),

Andika Pandu Puragabaya (F-Gerindra), Indira Chunda Thita Syahrul (F-PAN), dan Nurhayati Manoarfa (F-PPP).

Selain resolusi usulan Indonesia tersebut, Komisi Politik menyetujui pula adopsi penguatan kerja sama ASEAN dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yang diusulkan oleh tuan rumah serta keamanan *cyber* yang diusulkan Vietnam. Sementara Komisi Ekonomi

menyetujui tiga resolusi termasuk usulan Indonesia, "*Parliamentary Support for ASEAN Economic Community (AEC) Implementation*", yang berisi penguatan peran parlemen di setiap negara untuk mendukung implementasi MEA.

Selain usulan resolusi dari Indonesia, Komisi Ekonomi juga menyetujui dua resolusi lain mengenai UMKM yang merupakan usulan bersama Myanmar dan Vietnam, serta perluasan kesempatan kerja dan ketentuan kerja yang adil dan

kondisi kerja layak di ASEAN. Ini semua untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diusulkan oleh Myanmar.

Pada bagian lain, Komisi Sosial menyetujui empat resolusi mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, proteksi sosial bagi masyarakat ASEAN, kerja sama preventif pandemik virus zika, dan usulan Indonesia, "*Sustainable Tourism*", yaitu dukungan terhadap pariwisata berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam hayati dan warisan budaya.

Sedangkan Komisi WAIPA menyetujui tiga resolusi tentang penguatan *rules of procedures* WAIPA sebagai pertemuan khusus anggota parlemen perempuan ASEAN. Resolusi ini berisikan dukungan terhadap perempuan untuk mendapat kesempatan kerja dan kondisi kerja yang memadai bagi perempuan. Tunjangan dan fasilitas pra dan pasca persalinan juga dimuat dalam resolusi ini.

Sidang ditutup dengan penandatanganan *Joint Communiqué* yang mengukuhkan komitmen negara-negara anggota AIPA dalam pencapaian Visi ASEAN 2025. ■



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal

Kalimantan Selatan, Selasa (27/9).

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, anggaran mitra kerja Komisi VI itu tergolong kecil, maka sudah terlihat bahwa politik anggaran Pemerintah tidak Pro

kemandirian rakyat. Jika anggaran sektor Koperasi, industri menengah dan kecil difokuskan anggarannya diperhatikannya, akan terlihat perhatiannya.

"Sekarang kita lihat anggaran koperasi dan industri kecil dan menengah dipotong dan adanya isu pemberhentian kemitraan dari BUMN maka

keberpihakannya hanya *lip service*. Kita harap pemerintah melaksanakan program lebih efisien dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Hekal, dapil Jawa Tengah. ■

(as) foto: agung/br

Irtama DPR RI Raih Level-2 IACM

Inspektorat Utama (Irtama) DPR RI melaksanakan submit penilaian mandiri *Internal Audit Capability Model* (IACM). Di usianya yang terbilang masih dini, APIP Irtama mampu mencapai level 2 pada audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina APIP di Indonesia.

“ Alhamdulillah, meskipun belum genap berusia satu tahun, dengan upaya keras kita mampu berada pada level 2 IACM,” ungkap Kepala Irtama DPR RI Setyanta Nugraha saat memimpin rapat koordinasi di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Dijelaskan Setyanta lebih lanjut, meskipun telah meraih level 2, namun pihaknya tidak akan berpuas diri dan akan tetap melakukan pembenahan. Pembenahan ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapabilitas Irtama, diantaranya terkait



Inspektorat Utama DPR RI
Setyanta Nugraha

penguatan peran dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kita melakukan upaya dengan melengkapi berbagai *instrument*, termasuk memberikan pelatihan atau diklat baik yang sifatnya profesi maupun fungsional auditor. Auditor kita memang semuanya belum

bersertifikasi, dari 17 orang yang belum bersertifikasi ada delapan orang. Namun, lima diantaranya sudah melaksanakan diklat dan ujian, tinggal menunggu hasil kelulusan," jelas Setyanta.

Selain itu, ia menambahkan, diperlukan komitmen serta integritas yang tinggi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal

DPR RI untuk terus meningkatkan kapabilitasnya.

IACM merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik. Terdapat 3 variabel yang menjadi bahan pertimbangan dalam IACM, yakni: aktivitas audit internal, lingkungan organisasi dimana unit audit internal bernaung, dan lingkungan sektor publik di suatu pemerintahan.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah, ditemukan 85 persen APIP berada pada level-1, 14 persen APIP pada level-2, dan hanya 1 persen APIP berada pada level-3. Untuk itu, pemerintah menargetkan setidaknya seluruh APIP berada pada level-3 pada tahun 2019. ■

(ana.mp) foto: Arif/br

DPR RI Minta Pembentukan Parlemen Asia Dibahas Dalam Pokja

Wakil Ketua Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) Juliari Batubara mengatakan terkait wacana pembentukan Asian Parliament patut didalami dalam kelompok kerja (Pokja) khusus. Hal ini disampaikan Juliari dalam sidang Delegasi sidang *1st Executive Council and Staff and Financial Regulation APA* (Asian Parliamentary Assembly) di Sofitel Phnom Penh, Kamboja, 26 - 27 September 2016

“ Kami mendukung inisiatif pembentukan kelompok kerja yang akan membahas peta jalan dari pembentukan *Asian Parliament*, namun kami juga ingin menekankan pentingnya pembentukan sebuah forum yang dimana negara-negara dapat menunjukkan status implementasi dari resolusi-resolusi yang telah disepakati sebelumnya,” ujarnya melalui rilis yang diterima Parlemen, Jumat (30/9).

Lebih lanjut, Politisi F-PDI Perjuangan itu juga menyampaikan terkait pentingnya sebuah organisasi parlemen negara-negara kawasan Asia untuk memiliki kesekretariatan, hal ini



Tim Delegasi BKSAP DPR RI berfoto bersama dalam acara Asian Parliamentary Assembly

mengingat dinamika antar parlemen sudah semakin dinamis.

"Ini penting, karena saya melihat bahwa semakin berkembangnya

organisasi APA di Asia akan membutuhkan kesekretariatan APA yang dapat mengedepankan integritas dan juga dapat merefleksikan keanekaragaman negara-negara di Asia," katanya.

Hal senada juga disampaikan delegasi Pakistan dalam pertemuan tersebut yang dihadiri 22 negara anggota APA. Delegasi Pakistan tersebut menyampaikan inisiatif untuk pembentukan 5 grup regional Asia yang akan membahas mengenai detail teknis

dan peta jalan dari pembentukan *Asian Parliament*.

Sementara itu Dr. Nguon Nhel selaku Wakil Ketua Kedua dari Parlemen Kamboja menyuarakan pentingnya kebersamaan dari negara-negara Asia dalam menghadapi tantangan-tantangan baru saat ini antara lain krisis finansial, perubahan iklim, wabah penyakit Zika, perang yang terjadi di Timur Tengah dan serangan terorisme yang terjadi di Filipina, Bangladesh, Thailand dan juga Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut juga turut dihadiri Anggota Delegasi DPR RI lainnya yaitu Jazuli Juwaini (F-PKS) dan Andi Iwan Darmawan (F-Gerindra).

Asian Parliamentary Assembly dibentuk pada tahun 2006 di dalam sesi ketujuh dari *Association of Asian Parliamentary for Peace* dan saat ini memiliki keanggotaan sebanyak 42 negara dan 17 observers. Sidang ke-9 APA Plenary selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 28 November - 3 Desember 2016 di Siem Reap, Kamboja. ■

(fmm) Foto: BKS/AP/It

Perlu Komitmen Bersama Wujudkan Parlemen Modern, Berwibawa dan Kredibel

Visi DPR RI untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah Terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan yang Modern, Berwibawa dan Kredibel.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja BURT Hazrul Azwar saat melakukan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2015-2019 di Komplek Kepatihan Danurejan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (29/9).

Sebelum diskusi, Tim Kunker BURT DPR RI mendapat kehormatan diterima langsung Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Pejabat Sekretaris Daerah. Turut hadir dalam diskusi tersebut Dosen Fisipol Universitas Gajah Mada, Prof Dr Purwo Santoso, Ketua Prodi UPN Yogyakarta, Dr Ketut Nama, Pejabat SKPD DIY, Tokoh Masyarakat dan Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat.

Lebih lanjut politisi PPP ini menjelaskan bahwa Renstra dibentuk berdasarkan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Jo UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

"Ada dua misi dalam Renstra yaitu menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah,"

ungkap Hazrul.

Politisi Dapil Sumatera Utara ini mengapresiasi berbagai masukan dari kalangan akademisi, para pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan LSM di Yogyakarta guna mempercepat terwujudnya DPR RI yang modern, berwibawa dan kredibel sesuai dengan visi dan misi yang sudah disepakati.

Lembaga DPR RI yang modern harus didukung oleh sebuah *supporting system* berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga publik mengetahui kinerja Anggota Dewan secara *riil time*.

"Bagaimana mewujudkan lembaga DPR RI yang berwibawa ini terkait dengan perilaku dan akhlak para anggota dewan agar bisa menjadi contoh, perlu komitmen bersama," imbuh Hazrul.

Terkait masukan bahwa Renstra DPR RI ini cenderung akademis dan kurang terasa muatan politisnya, Hazrul melihatnya sebagai kritikan yang baik, karena memang dalam menyusun Renstra melibatkan kalangan akademisi.

"Kita sebenarnya sudah pada tahapan sosialisasi pelaksanaan

Renstra lima tahun kedepan, namun kita juga tidak menutup diri adanya masukan yang komprehensif sehingga makin menyempurnakan konsep Renstra di masa mendatang," pungkas Hazrul.

Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Hazrul Azwar didampingi Agung Budi Santoso (Wakil Ketua), Elva Hartati (Wakil Ketua), Andi Fauziah Pujiwati Hatta, Sri Meliyana, Muslim, Anshory Siregar, Irma Suryani Chaniago, Indah Kurnia dan Yulian Gunhar. ■

(edisi) foto: edisi/bur



Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar

Penanaman Moral Pancasila Harus Dimulai Sejak Dini

Penanaman dan pembinaan mental dan moral bangsa berdasarkan Pancasila harus dimulai sejak dini. Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPR RI, Winantuningtyas Titi Swasanany usai upacara bendera peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

“ Penanaman dan pembinaan mental serta moral bangsa yang berdasarkan Pancasila perlu dilakukan sejak dini, mulai dari tingkat dasar. Karena penanaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa instan. Hal itu untuk memperlihatkan kepada generasi muda akan pengalaman sejarah bangsa Indonesia dengan Pancasila yang telah berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta menghalau semua gangguan yang pernah ada baik dari dalam maupun luar negeri,” papar Win, begitu ia biasa disapa.

Oleh karena itu lanjut Win, ia menilai masih perlunya pelajaran pendidikan Pancasila untuk dimasukkan dalam kurikulum sekolah tingkat dasar. Meskipun tidak jarang ada pihak yang menganggap hal tersebut sebagai sebuah doktrin terhadap

kekuasaan tertentu. Namun pada dasarnya, hal tersebut sangat baik untuk memperlihatkan kepada anak-anak sebagai generasi penerus akan pengalaman dan



Suasana upacara bendera Setjen DPR RI pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila

sejarah bangsa dengan ideologi Pancasila. Menurut Win, gangguan dan rongrongan terhadap Pancasila dan ideologis bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri akan selalu ada. Oleh karena

itulah diperlukan kebesaran hati untuk terus waspada terhadap hal tersebut.

“Tugas dan tanggung jawab kita saat ini adalah mempertahankan Pancasila dari gangguan dan rongrongan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tugas ini tentu tidak kalah beratnya dibanding dengan perjuangan para pahlawan yang ikut merumuskan Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu kita harus terus waspada terhadap gangguan tersebut, dengan cara ikut peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, bangsa dan negara. Karena sejatinya Pancasila itu sendiri digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, seperti gotong royong, solidaritas terhadap sesama dan sebagainya. Atas dasar itulah seluruh generasi muda, khususnya PNS yang berada dilingkungan Setjen

DPR RI ini perlu menjaga dan mempertahankan tegaknya Pancasila, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban utamanya sebagai PNS, pelayan negara dan pelayan rakyat,” pungkas Win. ■

(Ayu), Foto: Hindra/br

Ketua BKSAP DPR RI Jadi Panelis WTO Forum di Jenewa

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjadi salah satu panelis dalam acara *WTO Public Forum* yang diselenggarakan pada 27 September 2016 di markas besar WTO di Jenewa, Swiss. Mengambil tema besar "Perdagangan yang Inklusif", *plenary session* ini merupakan salah satu dari 100 rangkaian acara yang mengundang pembicara dari seluruh dunia. Delegasi Indonesia turut diwakili oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang berasal dari Komisi I, Charles Honoris.

Dalam pemaparannya, Nurhayati menegaskan pentingnya dampak fenomena Nilai Rantai Global (Global Value Chain) dimana proses produksi dari bahan mentah hingga bahan jadi

diproses di banyak negara. Data dari WTO menyebutkan, GVC menyumbang 70% dari total perdagangan global. Nurhayati juga menekankan pentingnya mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang

punggung perekonomian Indonesia untuk lebih terlibat dalam GVC.

Di antara tiga panelis lain yang diwakili oleh OECD, Parlemen Uni Eropa, dan Parlemen Pakistan, Nurhayati menekankan pentingnya dibuat suatu kebijakan untuk melindungi ekonomi lokal, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta untuk menciptakan investasi yang berkeadilan yang dapat dinikmati semua masyarakat.

Nurhayati juga menyoroti agar kebijakan yang dibuat harus mampu mendorong UMKM dalam negeri agar dapat menerima manfaat dari GVC melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi, pembangunan kapasitas, serta transfer teknologi.

Sebagai tokoh perempuan, Nurhayati juga menekankan pentingnya memberdayakan perempuan. Hingga saat

Panja RUU Kebudayaan Komisi X Himpun Masukan ke Kalsel

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin Kunjungan Kerja Panja RUU Kebudayaan ke Provinsi Kalimantan Selatan didampingi 11 Anggota Dewan. Mereka diterima Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalsel Mohandas didampingi jajaran serta tokoh masyarakat, adat dan budayawan, Banjarmasin, Jumat (30/9).

“ Sekilas kami jelaskan bahwa kunjungan kerja Panja RUU Kebudayaan ini dalam rangka memajukan kebudayaan nasional, memandang perlu untuk mendapatkan masukan terhadap substansi pengaturan RUU. Khususnya terkait dengan pemajuan dan pengelolaan kebudayaan serta kelembagaan kebudayaan. Atas dasar itulah kami ingin menggali dan mengidentifikasi masalah langsung dari segenap pihak yang berkepentingan dengan kebudayaan terkait dengan strategi dan *grand design* yang perlu dikembangkan untuk pemajuan kebudayaan nasional Indonesia,” tegas Fikri.

Sementara itu, Kepala Dinas Budpar Mohandas menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas kunjungan ini. Menurutnya dinas ini setelah perampingan sejak berlakunya PP 41 ada lima urusan yang ditangani, yaitu kebudayaan, keolahragaan, pariwisata, ekonomi kreatif. “Jadi lima urusan dan lima kementerian yang menjadi koordinasi kami. Saya kira hanya satu-satunya yang ada tergabung di Provinsi Kalsel

ini yang belum terpisah,” jelasnya.

Terkait Rancangan UU Kebudayaan, dia mengatakan, sejak 2011 sudah dibicarakan namun hingga kini belum lahir juga. Diakui bahwa mengurus kebudayaan sangat luas dan kompleks dan banyak keterkaitannya. “Yang harus kita wujudkan kebudayaan tidak diurus tata nilai saja, tetapi juga bersifat benda.

Kalau diurus secara konsisten dan secara penuh rasanya kewalahan. Penanganan dari aspek kebudayaan maupun infrastruktur termasuk kebijakan-kebijakan lainnya. Kami menyambut baik atas kunjungan Komisi X DPR RI kesini.” imbuhnya.

Zulkifli Mustafa, Pengurus Perhimpunan Kesenian daerah Kalsel, memberikan masukan terkait dengan UU Kebudayaan



Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan pemda Kalsel

dengan mengatakan, dalam UU nanti perlu ada unsur perlindungan, serta pelestarian dan kemajuan, dan bahkan mungkin penciptaan. Oleh karena itu unsur yang sudah ada dalam RUU sudah sangat baik.

Selain itu, dia menyarankan adanya inventarisasi secara nasional, Selanjutnya peningkatan kompetensi, ini perlu dikaji betul sehingga seniman-seniman itu ada ukuran yang jelas. Selain itu dia setuju RUU Kebudayaan sebagai induk dan dalam perlindungan itu diharapkan ada pandangan yang mendasar tentang kebudayaan serta perlunya pemikiran dan solusi.

Sesditjen Kementerian Kebudayaan Nono Adya Supriyanto menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan UU Kebudayaan pasal 32 berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional. Pengertian memajukan ini mengandung arti pelestarian. Yang kedua, berkaitan bahwa budaya tradisional ataupun teknologi tradisional itu tidak diajarkan di sekolah.

Ada masukan, di sekolah kurikuler hanya 2 jam diberi pelajaran berkaitan tentang kebudayaan. Tapi di ekstrakurikuler itu bisa saja diberikan. Permasalahannya di Permen 92 tahun 2008 itu mengatur, kegiatan kulikuler untuk seni dan budaya dilakukan oleh guru padahal ketika berbicara seni tradisional tidak semua guru bisa mengajarkan itu. ■



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf

ini, perempuan masih mengalami ketimpangan dibanding pria terutama dalam bidang pendidikan, lapangan pekerjaan, serta aktivitas ekonomi lainnya. “Pemberdayaan perempuan sejalan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disepakati para pemimpin dunia pada

tahun lalu” ungkap dia.

Dalam sesi tanya jawab, Charles Honoris menyampaikan pandangannya serta bertanya kepada panelis terkait peran penting *e-commerce* yang sangat berkembang dalam beberapa tahun terakhir seiring kian mudahnya akses internet.

Plenary session yang berlangsung selama 90 menit tersebut berjalan dengan

sangat menarik dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Di akhir pemaparannya, Nurhayati melontarkan pernyataan tegas, “Jangan sampai GVC menjadi bentuk kolonialisme baru dari negara maju terhadap negara miskin.” ■

(mp, BKSAP), foto: dok_bksap/br

(br-mp) foto: hindana/br

Komisi V Optimis Tanjung Perak Bisa Kurangi *Dwelling Time*

Komisi VIII DPR RI berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), membahas Hasil Audit Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436H/2015M. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Akun Aset Tetap dan Akun Hutang BPIH Terikat.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena optimis, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dapat mengurangi *dwelling time*, yang selama ini menjadi keluh kesah dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Presiden menyoroti secara tajam permasalahan *dwelling time* di beberapa pelabuhan besar di Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, *dwelling time* adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu petikemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama. Proses *dwelling time* di pelabuhan terbagi atas tiga tahap, yaitu; *pre-clearance*, *customs clearance*, dan *post-clearance*.

Demikian dikatakan Michael usai memimpin pertemuan Tim Komisi V DPR RI dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III, Balai Besar Jalan Nasional, Basarnas, BMKG hingga *stakeholder* bidang kepelabuhanan, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, baru-baru ini.

"Kami mendapat penjelasan, sebelumnya *dwelling time* sekitar lima hari lebih, tapi kini sudah menurun menjadi

4,9 hari. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi cukup 3 hari. Sama dengan apa yang dilakukan di Tanjung Priuk dan pelabuhan lainnya. Pelabuhan ini menjadi sorotan karena pelabuhan ini bongkar muat untuk ekspor dan impor," jelas Michael.

Politisi F-PD itu juga menilai, perkembangan terkait dengan *dwelling time* di Tanjung Perak ini, baik dari sisi Kementerian Perhubungan maupun Pelindo III sudah sesuai dengan keinginan Pemerintah.

Namun di satu sisi Michael mencatat, perlu koordinasi dari 18 kementerian yang terlibat dalam *dwelling time*. Apalagi dengan adanya 118 peraturan yang melingkupi hal ini, semakin membutuhkan koordinasi yang baik.

"Bagaimana bisa mengintegrasikan satu kementerian dengan kementerian yang lain, dua saja sudah sulit apalagi jika ada 18 kementerian," kritik Michael.

Politisi asal dapil Papua Barat itu menekankan, jika bongkar muat bisa dikurangi rasanya juga menguntungkan terhadap konsumen sebagai pemakai barang-barang. Karena tidak dibebankan biaya lamanya kontainer di pelabuhan.

"Jika kita bisa mengurangi *dwelling time* ini, obsesi kita untuk berkompetisi di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) itu menjadi hal yang baik bagi sebuah perkembangan perekonomian sebuah negara," tutup Michael.

Sebelumnya, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, Chandra Irawan mengatakan, di Terminal Petikemas Surabaya, sekarang ada Satgas untuk mengurangi *dwelling time*. Chandra juga menambahkan, saat ini untuk *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih berada di angka 4,9 hari. "Ditargetkan seminggu ini, *dwelling time* ada penurunan signifikan," imbuh Chandra.

Kunjungan kerja spesifik ini juga diikuti oleh Anggota Komisi V DPR RI, Sudjadi dan Sadarestuwati dari F-PDI Perjuangan, Gatot Sudjito (F-PG), Nizar Zuhro (F-Gerindra). Kemudian Bahrum Daido (F-PD), Hanna Gayatri dari F-PAN, Alamuddin Dimiyati Rois (F-PKB), Sigit Sosiantomo (F-PKS), dan Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem). ■

(sf) foto: sefwan/br

Panja Pengawasan TKA DPR RI RDP dengan Tiga Kementerian

Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing Komisi IX DPR RI melakukan RDP dengan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Kepala Badan PPSDKM Kemenkes, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Macanegara dan Pengurus Konsil Kedokteran Indonesia di Ruang Rapat Komisi IX, Jakarta, Senin (3/10).

“ Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Saleh P. Daulay ini dipertanyakan tentang TKA tak berijin yang tersebar di beberapa sektor yaitu pendidikan dan tenaga media, pemberian ijin praktek yang tidak sesuai dengan wewenangnya, serta bagaimana pengawasan dan koordinasi antar Kementerian.

"Kita panggil mereka, karena 4 instansi ini sangat terkait dengan pengadaan tenaga asing. Misalnya

Komisi X Apresiasi Sanggar Paripurna Kebhinekaan

Komisi X DPR RI melalui Tim Panja RUU Kebudayaan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bali dalam rangka menerima masukan terkait pembahasan RUU Kebudayaan yang masih dalam pembahasan di DPR RI.

Dalam kunjungannya pada Jumat, (30/9) ke Sanggar Paripurna, Provinsi Bali, Ketua Tim Kunspek Mujib Rohmad mengatakan apresiasinya terhadap Sanggar Paripurna yang selalu menjaga nilai Kebhinekaan dan persatuan. Hal itu dikarenakan, Sanggar Paripurna ini tidak hanya mempromosikan budaya Bali, tapi juga budaya Indonesia secara keseluruhan.

"Saya apresiasi pimpinan Sanggar Paripurna dalam membangun semangat kenusantaraan. Ini luar biasa," ujar Mujib.

Sehingga keberadaan Sanggar Paripurna mampu membangun sinergitas antar daerah. "Dengan Sanggar ini, orang Bali tahu budaya Aceh dan orang Aceh tahu budaya Bali," sambungnya.

Bagi Mujib, hal ini menjadi penting dalam menjaga komitmen menjaga

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. "Kita punya komitmen bersama dalam menjaga Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Beragam dalam kesatuan," ujar Politisi Golkar tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi X meminta masukan dari pengelola Sanggar guna ditampung dalam RUU Kebudayaan. Para pengurus Sanggar pun menyambut baik kedatangan Komisi X tersebut.

"Kedatangan kami dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan informasi bagaimana kehadiran negara dalam hal ini Pemda, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan sanggar budaya yang dikelola masyarakat dgn partisipasi aktif," ujar Mujib.

Legislator dapil Jawa Tengah I tersebut



Ketua Tim Kunspek Mujib Rohmad bersama budayawan di Bali

berharap dengan adanya masukan terkait RUU Kebudayaan ini, Komisi X dapat menyelesaikan pembahasan di tahun 2016 ini. "Kami berharap semoga RUU Kebudayaan dapat segera dituntaskan tahun ini," ujar Mujib.

Sebelumnya, Kepala Sanggar Paripurna, I Made Sidia mengatakan terima kasih atas kehadiran Komisi X dalam menampung masukan dari Sanggar Paripurna. "Kami mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak Ibu Komisi X yang telah mengunjungi Sanggar Paripurna ini," pungkas Made. ■

(b) foto: kenitra/br

ditemukan banyaknya TKA yang bekerja di sektor pendidikan di satu wilayah, 71 persen pendidiknya dari luar negeri. Makanya kita ingin tahu informasi dari mereka bagaimana prosedur masuknya guru asing," tuturnya.

Terkait pemberian ijin salon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata juga turut menjadi perhatian, karena m e n u r u t legislator F-PAN ini,

seharusnya wewenang pemberian ijin salon yang ada tindakan medis (operasi kecil, dan lain-lain) itu wewenang Kemenkes.

"Kementerian Pariwisata harusnya jangan mengeluarkan ijin yang bukan wilayahnya, sehingga tidak ada tumpang tindih jika memang membuka praktek harus dilapor ke Kemenkes,"katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX Irma Suryani yang mengatakan permasalahan produk ilegal salah satunya karena tidak adanya koordinasi antar lembaga terkait. Misalnya ijin salon diberikan oleh kementerian pariwisata yang bukan wewenangnya.

"Tidak pernahkah Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan dinas kesehatan karena produk ilegal ini bicara soal medis. Aneh bagi saya kalau antar kementerian tidak ada koordinasi, ego dari setiap kementerian selalu mejadi masalah," tegasnya.

ini juga meminta laporan Tim

Pengawasan Orang Asing (PORA) harus menjadi perhatian. Karena dari pemaparan yang disampaikan, Tim PORA hanya bekerja by kasus padahal yang paling penting itu melalukan tindakan preventif (pencegahan).

" Tim PORA bekerja by kasus, Saya kecewa, yang lebih pentig bagaimana tindakan preventifnya bukan menyelesaikan kasusnya saja, kalau akar permasalahan tidak diselesaikan bagaimana mau menyelesaikan masalah. Jangan sampai Tim PORA memberatkan pemerintah saja dengan menggunakan biaya APBN," tuturnya.

Selain itu, anggota DPR RI Dapil Sumsel II ini juga mengatakan Komisi IX harus secara tegas menyampaikan syarat menggunakan bahasa Indonesia untuk TKA harus tetap ada. Apalagi di sektor kesehatan yang berkaitan dengan komunikasi antara pasien dengan dokter, banyak masyarakat yang belum bisa berbahasa inggris. ■

(rnm,mp) foto: Ristika/br



Wakil Ketua Komisi IX Saleh P. Daulay

Dukung Perubahan Status IAIN Asal Tak Menggerus Nilai Keislaman

Anggota Komisi VIII Endang Maria Astuti tak memperlumahkan keinginan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta untuk mengubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Namun yang terjadi selama ini, tergerusnya esensi keilmuan agama saat IAIN menjadi UIN. Hal inilah yang sering menjadi perdebatan kami.

“ Kalau mau dijadikan UIN, inti dari keilmuan agama jangan malah menjadi pudar, justru itu adalah ruh dari perguruan tinggi islam. Para alumni lulusannya diharapkan menjadi pelopor revolusi mental,” kata Anggota Komisi VIII Endang Maria Astuti saat memimpin Tim Kunspek di IAIN Surakarta, Kamis (29/9).

Ditambahkannya, dengan kondisi IAIN Surakarta yang memiliki jumlah tenaga pengajar dosen terbatas dan adanya moratorium PNS, serta sarana dan prasarana yang minim, hal ini menjadi buah simalakama jika adanya gagasan perubahan status IAIN Surakarta.

“ Disatu sisi menginginkan adanya perubahan status, namun banyak spek yang belum bisa terpenuhi. Jangankan penambahan dosen, guru saja sampai saat ini Kementerian Agama masih banyak tanggungan. Saya menyarankan agar manajemen dari IAIN ditata dulu kualitasnya” ujar Politisi F-Golkar itu.

Menurut Endang, kualitas dari lulusan alumni yang ada saat ini perlu peningkatan, dan diharapkan mampu berkarir di Legislatif, Eksekutif, dan Akademik. Sehingga, secara tidak langsung menjadi publikasi yang masif ke masyarakat luas. Mereka memiliki gambaran jika anaknya sekolah di IAIN Surakarta akan seperti mereka.

Selain itu, lanjut Endang, Perguruan Tinggi Islam di Surakarta sangat strategis sekali, kedepan bisa menjadi barometer kampus Islam di Indonesia. Terlebih dengan terus

meningkatnya animo masyarakat terhadap Perguruan Tinggi Islam.

Apalagi banyak orang tua yang menginginkan anaknya memiliki akhlak yang baik jika masuk ke sekolah agama islam.

“Sejak dua tahun yang lalu saya selalu mendorong b a h w a , m e m b a n g u n g e n e r a s i j u g a h a r u s d i m u l a i p a d a t i n g k a t a n p a l i n g b a w a h .



Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti

Mulai dari madrasah, ibtidaiyah dan aliyah, ini menjadi t u g a s K e m e n a g m e m p e r k u a t p e n d i d i k a n d a r i t i n g k a t a n p a l i n g b a w a h . D a n T i d a k s e d i k i t a n a k - a n a k d i d i k k i t a p u t u s s e k o l a h , i n i p e r l u m e n j a d i p e m i k i r a n b e r s a m a m e m b u a t

program pengentasan pendidikan,” terang Politisi Dapil Jawa Tengah IV ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor I bid. Akademik, Abdul Malik mengatakan, percepatan kampus IAIN Surakarta tergolong lambat, padahal kampus kami masuk ke dua belas besar peminatan. Tapi berhubung daya tampungya minim, kami hanya menerima sedikit.

“Kami pernah mengajukan pembelian lahan disekitar kampus, sudah kami ajukan tapi belum di setujui. Karena terlalu lama, akhirnya sudah dibeli oleh pihak swasta,” jelasnya

Ia menambahkan, belum lagi harapan besar masyarakat yang menginginkan IAIN melahirkan generasi luar biasa. Padahal kami kekurangan dosen, peningkatan mutu dan kualitas mahasiswa terancam. ■

Gita foto: Jakarta

Pusat dan Daerah Perlu Kerjasama untuk Kembangkan Ekonomi Kreatif Lokal

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri mengatakan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif lokal. Menurutnya, potensi daerah dalam hal ekonomi kreatif perlu untuk terus digali, termasuk dalam bidang film dan musik.

“ Menurut saya, potensi film, musik Indonesia tidak kalah dibandingkan negara lain,” kata Fikri pada saat Forum Group Discussion Penguatan Ekonomi Kreatif di Daerah dalam Pengembangan Subsektor Perfilman di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, baru-baru ini. Rilis acara ini diterima Parlemen pada Senin (3/10).

Politisi F- PKS itu pun menyadari bahwa

Penggunaan Medsos dalam Pilkada Perlu Diawasi

Jelang Pilkada serentak 2017, penggunaan media sosial (medsos) untuk kampanye perlu diawasi secara ketat. Isu sara akan mudah terangkat seiring kampanye masif Pilkada. Perlu ada pasukan *cyber crime* yang mengawasi ujaran di dunia maya.

Demikian mengemuka dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI, Kamis (29/9). Anggota DPR RI Masinton Pasaribu yang hadir sebagai pembicara mengatakan, etika publik harus dijaga dalam mengakses medsos pada Pilkada serentak nanti. Medsos diakui sebagai media yang paling efektif untuk berkampanye, baik negatif maupun positif. Daya sebar juga sangat luas dan cepat.

Berbagai blok website, lanjut anggota F-PDI Perjuangan itu, juga perlu diawasi. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik selama Pilkada nanti. Namun, pengawasan yang dilakukan, sambung Masinton, hendaknya tidak membatasi kebebasan berpendapat.

Pengamat politik Muhamad Qodari pembicara lainnya menyatakan, berbeda dengan media konvensional seperti media cetak, pengguna medsos justru kerap



Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu saat diskusi Dialektika Demokrasi

menggunakan akun nama yang tak jelas. Karena bebas menggunakan nama akun, isu sara pun bisa membanjiri medsos, apalagi dalam Pilkada serentak. Ujaran negatif bisa membanjiri medsos, tanpa pertanggungjawaban.

"Medsos bisa menjerumuskan pada perilaku asosial. Dan polisi perlu intervensi mengawasi bahaya penggunaan medsos,"

kata Qodari. Ia bahkan mengusulkan ada *cyber patrol* dari Polri yang selama 24 jam mengawasi berbagai ujaran dan kampanye hitam di medsos.

Sementara pembicara ketiga, Juru Bicara Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto menyampaikan, Polri kini telah dilengkapi dengan regulasi berupa Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau *hate speech*. Komunikasi yang kerap tak etis para pengguna medsos, jadi sasaran pengawasan.

Dalam komunikasi di medsos, yang buruk bisa jadi baik, dan yang baik bisa jadi buruk. Amarah, kebencian, bahkan fitnah, selalu muncul dalam jejaring sosial Medsos. Tentu komunikasi kebencian dan caci maki di dunia maya tidak boleh dibiarkan. Hukum memang harus ditegakkan. ■

(mb) foto: jayudibr



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih

pengembangan ekonomi tidak cukup hanya mengharap sumber daya alam saja.

"Berkaca dari negara lain, Inggris dan Korea Selatan misalnya, mereka tidak lagi mengandalkan SDA, tetapi

dari ekonomi kreatif," imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, dalam acara juga dilakukan Penandatanganan MoU tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif antara Bekraf dan Kabupaten Tegal. Deputy Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Endah Wahyu Sulistianti menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat perfilman di daerah.

Endah juga menyebutkan, salah satu cara untuk mengembangkan film daerah adalah dengan mendorong bioskop di daerah untuk menayangkan film yang berasal dari daerah tersebut. "Jangan hanya menayangkan film dari luar daerah," pungkas Endah.

Data Bekraf menunjukkan, ada 16 subsektor ekonomi kreatif, yakni aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, *fashion*, film, animasi video, fotografi, kriya (kerajinan tangan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.

Namun dari 16 subsektor itu, baru tiga subsektor yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif yaitu kuliner sebanyak 32,4 persen; *fashion* 27,9 persen; dan kerajinan 14,88 persen. Dalam setahun terakhir, ekonomi kreatif telah menyumbang Rp 642 triliun atau 7,05 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. ■

(sf) foto: jikalau.br

Atasi Peredaran Obat Palsu BPOM Harus Sidak Reguler

Peredaran vaksin dan obat palsu yang terjadi begitu masif, menuntut Badan POM untuk melakukan sidak secara reguler ke sejumlah toko obat dan apotek. Koordinasi antar-instansi perlu dilakukan untuk menghentikan jalur peredaran vaksin dan obat palsu.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena saat memimpin Tim Kunjungan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik, di Balikpapan, Kalimantan Selatan, Jumat (30/9)

"Komisi IX ingin hukumannya itu membawa efek jera, karena ini menyangkut nyawa manusia. Kita meminta hukuman seberat-beratnya untuk pengedar dan produsen. Kita juga minta Badan POM melakukan sidak secara reguler ke pasar-pasar seperti Pasar Pramuka, Pasar Glodok, dan Pasar Roxy." terangnya.

Lebih lanjut menurut Ermalena, pemerintah pun harus memberi perhatian lebih atas kerja Badan POM hingga ke tingkat kabupaten/kota, "Karena di sinilah peredaran obat palsu dan konsentrasi penduduk terpusat. Harus ada juklak sebagai petunjuk arah kerja, agar Badan POM betul-betul maksimal mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi



Suasana pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Dinkes Banjarmasin

terhadap peredaran obat dan makanan di masyarakat," tambahnya.

Pemberdayaan masyarakat, sambung politisi PPP ini, perlu pula dilakukan, terutama kepada para orangtua untuk ikut mengawasi jajanan anak-anaknya di sekolah. Tidak mungkin Badan POM menjangkau pengawasannya hingga ke jajanan anak-anak. Memang lanjut Ermalena, ada tiga masalah krusial yang saat ini dihadapi Badan POM dan itu harus segera diatasi. Ketiga masalah itu adalah anggaran, pemberdayaan SDM, dan regulasi.

Ditambahkan Ermalena, yang tidak

kalah pentingnya adalah peran para apoteker yang berada di garda depan untuk menyeleksi obat-obatan yang beredar. "Apoteker harus bisa mengidentifikasi obat-obatan. Apabila dia merasa curiga, maka dia bisa meneruskan ke Badan POM. Apabila Badan POM meyakini itu palsu dan tidak memenuhi syarat, bisa diteruskan lagi ke

langkah hukum. Jadi, koordinasi antarpihak jadi kepentingan bersama," ucap Ermalena.

Turut serta dalam rombongan, Ketut Sustiwana (F-PDIP), Imam Suroso (F-PDIP), Putih Sari (F-Gerindra), Suir Syam (F-Gerindra), Ayub Khan (F-Demokrat), Siti Mufattahah (F-Demokrat), Hang Ali Saputra Syah Pahan (F-PAN), Siti Masrifah (F-PKB), Adang Sudrajat (F-PPS), Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), Okky Asokawati (F-PPP), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem), Amelia Anggraini (F-Nasdem), Frans Agung Mula Putra Natamenggala (F-Hanura). ■

(rief) foto:arif/br

Dewan Apresiasi Pemprov NTT Mengentaskan Kemiskinan Melalui Koperasi

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mengembangkan koperasi guna mengentaskan masalah kemiskinan.

“ Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi NTT, mengambil pokok utama dari kultur di sini yaitu kultur kebersamaan dan gotong royong,” kata Anggota Komisi VIII Ledia Hanifa saat pertemuan Tim Komisi VIII dipimpin Ketua Komisi VIII M. Ali Taher dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kantor Gubernur NTT, Kupang, NTT, Kamis (29/9)

Ia melihat angka kemiskinan di NTT prosentasenya antara 9 persen bahkan sampai 32 persen. Menurutnya ini sesuatu yang berat yang harus dilakukan Pemprov NTT.

"Tadi saya melihat, pendekatan koperasi sesuatu yang penting. Karena jika pemberdayaan ekonomi dilakukan secara individual ini akan menyulitkan. Tapi karena dilakukan bersama-sama ini akan menjadi lebih

baik,” jelas politisi PKS ini.

Menurutnya ini adalah potensi. Koperasi di NTT ada sekitar 3.000 koperasi dan yang berjalan dengan baik ada sekitar 2.050. "Ini potensi besar, dimana dua per tiga koperasinya bisa berjalan, kemudian usahanya 2,5 triliun dan SHU nya 211 miliar," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ledia mengusulkan adanya pendampingan kepada jajaran Kementerian Sosial yang



Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa

turut serta dalam kunjungan tersebut. "Jangan membiarkan mereka bergerak

sendiri," harapnya. Karena menurut Ledia, Program Keluarga Harapan (PKH) nanti yang akan diarahkan kepada Kelompok Usaha Bersama KUBE PKH. Dana KUBE di NTT ada yang dari APBN dan yang dikeluarkan dari APBD. "Arahnya perlu dikumpulkan jadi sebuah koperasi KUBE sehingga mereka akan bergerak bersama," terangnya.

Ia menginformasikan bahwa yang menjadi persoalan di KUBE di Indonesia itu hanya berjalan selama satu tahun dan setelah itu selesai. Jadi kalau mau dibilang mereka mau dihentikan atau mau digraduasi dari PKH itu susah.

"Saya belum melihat di tempat lain dimana koperasi difokuskan. Saya pikir ini peluang yang luar biasa," tandasnya.

Ia pun meminta kepada Kementerian Sosial pendampingan secara langsung dan arahnya bahwa KUBE-KUBE PKH atau non PKH itu dikumpulkan menjadi satu. Ia minta Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Koperasi agar bisa bersinergi. ■

(se) foto: Suci/br

Komisi VIII Apresiasi Transformasi STAIN Jurai Siwo ke IAIN

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan Harun mengatakan, tujuan dari kunjungan kerja spesifik ini untuk melihat secara langsung kondisi riil di daerah dan menyerap aspirasi. "Kami datang kemari karena ingin mengetahui informasi secara faktual di STAIN Jurai Siwo ini," jelas dia.

Kinginan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Kota Metro bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ditanggapi baik Komisi VIII DPR RI. Ini diungkapkan pada kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke

STAIN Jurai Siwo, Kamis (29/9).

Terkait usulan STAIN naik status menjadi IAIN, pihaknya mengaku setuju dan siap mendukungnya. Termasuk dari segi anggaran bagi peningkatan sarana dan prasarana.

"Tahun depan kami sudah merencanakan untuk memberikan anggaran sebesar Rp 24,3 miliar kepada STAIN Jurai Siwo untuk perluasan dan pembangunan fasilitas gedung. Kita dukung peningkatan status ini, dengan catatan STAIN Jurai Siwo dapat menyiapkan segala hal terkait persyaratannya," ujarnya.

Namun Komisi VIII meminta komitmen pemerintah daerah untuk ikut mendukung majunya lembaga pendidikan agama Islam negeri. Seperti dengan memberikan bantuan lahan kepada Kementerian Agama untuk mendirikan MAN IC.

Ketua DPRD Metro Anna Morinda mengaku siap mendukung perkembangan STAIN Jurai Siwo. Tetapi ia

meminta Komisi VIII dapat menjadi koordinator, pasalnya dalam pembicaraan terkait lahan yang saat ini digunakan STAIN Jurai Siwo mencakup Kota Metro dan Lampung Timur.

"Karena itu kami sangat berharap dan mendukung STAIN dapat disetujui naik status menjadi IAIN. Dari data kami, sekitar sembilan provinsi yang belajar disini (STAIN). Pemerintah Kota Metro pun siap mendukung. Kedepannya kami juga berharap setelah naik menjadi IAIN, dapat meningkatkan status lagi menjadi UIN," tambah Asisten I Masnuni mewakili Walikota Metro Achmad Pairin.

Sebelumnya Ketua Stain Kota Metro . Hj. Enizar, secara global mengurai profil STAIN Jurai Siwo kepada 14 anggota Komisi VIII DPR RI. STAIN Jurai Siwo memiliki tiga jurusan, yang setiap tahunnya melahirkan sekitar 500 sarjana dan menjadi salah satu pilihan pendidikan lanjutan negeri yang paling diminati. ■

(Ena,mp), Foto: Krena/br



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan Harun

Pilkada Serentak 2017 Butuh Perhatian Serius

Konflik sosial yang mungkin terjadi bersamaan dengan Pilkada serentak 2017 harus diantisipasi sejak dini. Pilkada tahun depan butuh perhatian serius, tidak saja dari Polri, tapi juga DPR RI dan pemerintah. Daya tarik kontestasi Pilkada juga menarik dicermati.

Ada 101 daerah yang akan menggelar Pilkada pada 2017, yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Hanya saja, Pilkada di DKI Jakarta kerap menenggelamkan perhatian publik pada kontestasi Pilkada di daerah lain. Inilah yang mengemuka dalam *workshop* bertajuk Pilkada Serentak 2017 'Berbagi

Permasalahan dan Solusi' yang digelar Badan Keahlian Dewan DPR RI, Kamis (29/9).

Hadir sebagai pembicara Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Menurut Rambe, ada banyak isu krusial yang menyertai revisi UU Pilkada, diantaranya antisipasi calon tunggal, persoalan dinasti politik, dan pembatasan dana kampanye. Biaya kampanye Pilkada sekarang, kata Rambe, lebih mahal dari Pilkada sebelumnya.

Untuk itu, perlu diatur tentang biaya kampanye dengan lebih jelas. Belum lagi, perlu ada aturan yang menegaskan tentang konflik partai. Ini semua untuk menjaga stabilitas Pilkada yang dihelat secara masal pada 2017. Sementara menurut Titi, revisi atas UU Pilkada memang butuh perbaikan sungguh-sungguh. Ada 104 petahana yang kembali bertarung dalam Pilkada, 80 pasangan dari perseorangan, dan 248 pasangan diusung partai politik.

Yang menarik dalam persaingan Pilkada, ujar Titi, justru di Aceh, bukan DKI. Di

Aceh ada 6 bakal calon yang terdiri dari 3 pasang diusung partai politik dan 3 pasang lagi perseorangan. Mantan kombatan GAM justru pecah kongsi dalam Pilkada di tingkat provinsi ini. Bahkan, petahananya pun pecah dan saling mencalonkan diri.

Menurut Titi, ada banyak konflik yang mungkin terjadi, selain di Aceh ada juga di Papua. Penggunaan noken (tas tradisional-red) khas Papua digunakan sebagai kotak suara. Dalam konsep noken ini, kepala adat di sana sangat menentukan perolehan suara rakyat. Perludem yang dipimpinnya, sambung Titi, sempat menggugat penggunaan noken dalam Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK memutuskan bahwa noken adalah ciri khas kedaerahan yang boleh digunakan dalam berdemokrasi.

Persoalan lain adalah politik uang dalam Pilkada yang masih jadi kontroversi. Ada peraturan KPU yang membolehkan penggunaan uang, misalnya untuk makan dan sewa perlengkapan pertemuan. Namun untuk dana *transport* tidak diperkenankan dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk tiket saja. Persoalan ini masih menyimpan kerawanan politik uang yang sangat tinggi. ■

(mb) foto:rijput/br



Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman

Komisi II Desak Bawaslu Perketat Aturan Black Campaign

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy meminta kepada Bawaslu untuk memperketat peraturan dan sanksi terhadap pelaku kampanye hitam. Hal itu diungkapkan saat RDP dengan Bawaslu pada Selasa, (04/10) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta guna mematangkan aturan mengenai larangan politik uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembangunan Daerah Perbatasan Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Utara yang langsung berbatasan dengan Negara Malaysia, tentu ini menjadi sangat penting dimana Nunukan menjadi garda terdepan Indonesia. Sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis bahwa Nunukan adalah garda terdepan dan penyangga NKRI.

“ Kita meminta agar Pemerintah memprioritaskan percepatan pembangunan di daerah tersebut terutama infrastruktur transportasi yang menghubungkan antar daerah di Kabupaten Nunukan, seperti Sebatik, Krayan, dan Lumbis Ogong yang saat ini kondisinya masih jauh dari ideal sebagai teras negara,” ungkap Fary sesuai pertemuan dengan Bupati Nunukan, Kamis (29/9).

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengapresiasi atas kunjungan Komisi V DPR RI ke Kabupaten Nunukan. Laura berharap agar kunjungan tersebut menjadi sebuah langkah awal positif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Nunukan.

"Saya sangat berterimakasih kepada anggota DPR RI dan beberapa lembaga kementerian terkait yang mau melihat langsung kondisi Nunukan. Kita juga berharap agar program-program itu akan secepatnya direalisasikan demi pelayanan



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kaltara

masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan bersama," harap Laura.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi mengatakan bahwa harus ada sikap dan perhatian khusus dari pemerintah terhadap pembangunan di wilayah terdepan Indonesia.

"Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan yang merupakan garda terdepan bangsa Indonesia akan terus kita perjuangkan, ungkapnya.

“ Memang kami sudah sekali rapat dan minta Bawaslu menyempurnakan rancangan peraturannya. Karena kami melihat Bawaslu pada rapat pertama belum mengakomodir faktual-faktual yang terjadi di lapangan,” ujar Lukman.

Politisi PKB ini mengatakan Komisi II DPR RI ingin peraturan Bawaslu ini tidak multi-persepsi dan ingin *clear* dijelaskan secara jelas termasuk definisinya mengenai istilah Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM).

"Apakah yang dimaksud terstruktur menggunakan struktur pemerintah? Struktur mana yang digunakan? Kita ingin peraturan Bawaslu ini tidak mengambang,

tidak multipersepsi dan ingin *clear* dijelaskan secara jelas termasuk definisi-definisinya," ujarnya.

Lukman mencontohkan, ketika Bawaslu menetapkan Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) apakah sudah meninjau jumlah uang yang disebarkan ketika melakukan politik uang.

Lukman mengatakan, Komisi II DPR RI menginginkan masing-masing pasangan calon dan tim suksesnya memahami TSM seperti apa, termasuk terkait sumber-sumber pendanaan yang menjadi objek audit Bawaslu yang mana.

Selain itu Komisi II DPR RI juga mendorong Bawaslu agar membuat aturan yang melarang adanya kampanye hitam

Sementara Ketua Komisi V Fary Djemi Francis berjanji akan meminta pemerintah merealisasikan berbagai pembangunan titik-titik vital di Nunukan ini, diantaranya perluasan Bandara Nunukan agar terkoneksi dengan Bandara Sepinggian Balikpapan, perbaikan sarana dan administrasi di Pelabuhan Tunontaka.

"Tadi saat kita sidak di beberapa Pelabuhan yang ada di Nunukan masih banyak kita temukan kesemerawutan yang harus segera dibenahi," ungkap Fary.

Jika hal ini tidak dibenahi, menurut Fary bukan tidak mungkin akan membuka peluang terjadinya penyelundupan baik penyelundupan manusia atau penyelundupan barang terutama Narkoba.

Terkait dengan keinginan masyarakat agar rute penyeberangan Nunukan - Surabaya kembali dibuka, Fary ungkapkan bahwa akan memperjuangkan dan mendorong rute penyeberangan jalur ini segera dihidupkan kembali. ■

di media sosial antar pasangan calon kepala daerah.

Politikus PKB itu menilai, konten-konten sosial media yang melakukan kampanye hitam, pengawas pemilu tidak bisa membatasinya.

"Dalam PKPU maupun rancangan peraturan Bawaslu, kami sepakat bahwa akun sosmed yang digunakan resmi paslon (pasangan calon_red) harus resmi terdaftar. Kita tidak bisa menata sampai ke akun-akun yang liar," ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya aturan yang ketat, maka diharapkan akan mengurangi terjadinya perang kampanye hitam di media sosial. ■

(skr.mp) foto: Singgih/br

(bs) foto: jaywah/br

DPR RI Perjuangkan Kelanjutan Beasiswa Mahasiswa Indonesia di Turki

Sejumlah isu termasuk penghentian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia di Turki menjadi perhatian delegasi DPR RI dalam pertemuan bilateral dengan delegasi Parlemen Turki. Agenda ini berlangsung di sela-sela sidang *1st Executive Council and Staff and Financial Regulations APA* (Asian Parliamentary Assembly) yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja, 26 - 27 September 2016.

Dua perwakilan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari Batubara dan Jazuli Juwaini memberikan perhatian pada persoalan pelajar Indonesia yang ada di Turki. Dua duta BKSAP ini bersama-sama memperjuangkan kelancaran mahasiswa Indonesia yang menuntut Ilmu di negara tersebut.

"Kami berharap Parlemen Turki dapat memberikan solusi alternatif kepada Pemerintah Turki mengenai pembiayaan beasiswa tersebut," kata anggota delegasi DPR RI Jazuli Juwaini (F-PKS) dalam rilis yang diterima Parlemen.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab antara kedua belah pihak tersebut, ia menyebut DPR RI memberikan perhatian dan berupaya mencari solusi bagi sekitar



Pertemuan Tim Delegasi BKSAP DPR RI dengan Pemerintah Turki

280 mahasiswa peserta program PASIAD yang terhenti akibat pergolakan politik di negara tersebut.

Pada bagian lain Ketua Delegasi DPR RI Juliari Batubara (F PDI Perjuangan) juga memberikan apresiasi atas pemberian akses

konsuler bagi tiga mahasiswa Indonesia yang sempat ditahan otoritas Turki dengan tuduhan terlibat gerakan Hizmet/FETO. Saat ini KBRI Ankara sudah memperoleh akses ke konsuleran pada mahasiswa Indonesia yang ditahan dan dijadwalkan akan menjalani persidangan pada bulan November 2016.

"Kami berterimakasih atas kerjasama pemberian akses konsuler yang diberikan oleh pemerintah Turki kepada pelajar Indonesia di Turki dan kerjasama yang baik antara instansi terkait untuk permasalahan tersebut," tutur Juliari.

Menanggapi hal tersebut, Buryan Kayaturk, selaku Ketua Delegasi Parlemen Turki menyatakan bersedia membantu perihal penghentian beasiswa mahasiswa Indonesia dan berjanji akan mengangkat isu ini dalam pembukaan paripurna *Grand National Assembly*.

Delegasi DPR RI dan Parlemen Turki sama-sama berharap kerjasama di antara dua negara akan semakin meningkat di sektor perdagangan yang saat ini dibahas melalui *Indonesia-Turkey Comprehensive Trade Agreement (IT-CTEPA)*. Kedua pihak juga sepakat meningkatkan dialog antara Indonesia dan Turki pada berbagai bidang termasuk menuntaskan permasalahan islamofobia. ■

(foto: BKSAP), foto: dok-BKSAP/br

Cegah Obat dan Vaksin Ilegal Masuk Sulbar

Anggota Komisi IX DPR RI, Enny Anggraeny Anwar menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar pro aktif melakukan kegiatan preventif untuk mencegah peredaran vaksin dan obat-obatan ilegal di Sulbar. Selain itu dia juga meminta kepada jajaran Polda Sulbar agar tidak ada narkoba yang masuk ke Sulbar.

“Penanggulangan vaksin-vaksin dan obat palsu, sebelum terjadi saya kira kita lebih baik mencegah, dan juga soal peredaran narkoba yang t a d i



Anggota Komisi IX DPR RI Enny Anggraeny Anwar

disampaikan pak Kapolda karena itu sangat rawan dan itu yang membuat saya merasa tidak enaklah," ungkap Enny sesaat setelah dialog dengan pemerintah setempat, di Mamuju Sulbar, Jumat (30/9) sore.

Dalam kunspek ini juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar Ahmad Azis, bahwa antara Pemprov dan Pemkab telah bersepakat agar pembelian obat dan vaksin di sarana distribusi yang resmi.

Sedangkan untuk menjamin mutu keamanan serta khasiat obat dan vaksin yang beredar se-Sulbar, Azis

memaparkan, dengan cara melakukan kegiatan kerja sama antara pengelola obat dan pengelola vaksin.

Dengan cara melibatkan PT Bio Farma selaku produsen vaksin untuk melakukan bimbingan teknis tentang pengelolaan vaksin yang sesuai standar di Sulbar.

Enny yang merupakan Anggota Dewan dapil setempat mengatakan, "Mudah-mudahan dengan kunjungan Tim Komisi IX dengan adanya Kapolda di sini BPOM juga yang sudah berdiri baru segala masalah obat palsu dapat teratasi di sini," harapnya. ■

(foto) foto: Eka/br



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau lokasi pembangunan tol interchange di Manado

Manado Kian Macet, Harus Disiapkan Infrastruktur Memadai

Kota Manado perkembangannya luar biasa sebagaimana disampaikan Gubernur Olly Dondokambey bahwa Ibukota Sulut ini tambah macet karena pariwisata berkembang pesat. Sekarang sudah ada 5-7 penerbangan dari Cina yang langsung ke Manado.

“ Karena itu perkembangan yang luar biasa ini harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Kita lihat sendiri betapa macetnya jalur Bitung menuju Manado ini,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Tim Kunspek Komisi V berkunjung ke lokasi pembangunan tol Interchange Manado, Jumat (30/9) lalu.

Menurutnya, saat ini sedang dibangun tiga ringroad, ringroad I dan II sudah selesai dan ringroad III dalam proses pembangunan. “ Interchange ini dimaksudkan untuk memecah jalur Bitung-Manado maupun yang menuju Lintas Sulawesi, seperti ini kondisinya,” katanya di lokasi yang sangat padat kendaraan dari berbagai arah ini.

Proyek ini direncanakan selesai Desember mendatang, diharapkan bisa mengurai kemacetan yang ada di Manado. Selanjutnya kata Lasarus, ada tiga interchange yang akan dibangun dan Komisi V mendorong agar seluruh proses berjalan dengan baik dan kunjungan langsung ke lapangan ini untuk mengecek apakah APBN-P 2016 yang disetujui DPR RI ada kendala di lapangan. Dari laporan yang diterima, 7 km dari APBN dari 7 km dari *loan* China sudah selesai, tinggal bagian

BPJT di ujung yang baru dilakukan perhitungan. Sejauh ini, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, belum terlihat adanya kendala di lapangan.

Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana menambahkan, jalan tol Manado-Bitung termasuk rencana strategis nasional yang sampai saat ini belum terwujud. Namun ada komitmen Gubernur Sulut dan KemenPU-PR untuk segera menuntaskan. “ Jalan tol sepanjang 40 km ini bisa segera diselesaikan karena akan sangat membantu kelancaran lalu lintas jalur tersebut,” tegasnya.

Apalagi lanjutnya, visi Gubernur yang akan menjadikan Sulut sebagai destinasi pusat pertumbuhan baru luar Jawa yang prospektif. Karena itu Komisi V mendorong KemenPU-PR agar tiga seksi tol yang direncanakan ini bisa selesai, seksi I *loan* China pembahasan sudah 96% , seksi II multi years baru 26% diharapkan bisa digenjut. Untuk seksi III ditender untuk BPJT karena medannya tidak seberat dua seksi sebelumnya, diharapkan banyak investor berminat. Sedangkan hal-hal secara teknis ada problem di lapangan diharapkan bisa segera dituntaskan secepatnya. ■

(mp)/foto: mustar/br

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI



Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan sambutan dalam acara kirab agung kasultanan kasepuhan Cirebon, Minggu (2/10) Foto: Ryan

Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri dipimpin Ketua Komisi Rambe Kamarul Zaman bahas pagu anggaran Kemendagri tahun 2017, Senin (3/10) Foto: Jayadi/hr



Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan KPI dipimpin Wakil Ketua Meutya Viada Hafid bahas proses perpanjangan ijin 10 Lembaga Penyiaran Swasta, Senin (3/10). Foto : Jaka